



Integration of Pancasila Values and Islamic Teachings in Civic Education from the Perspective of the Qur'an and Hadith and Its Implications for Educational Participation and Gender Equality in Bangka Regency

Frans Tory Damara Pradipta*¹, Aldian Kurniawan Saputra ²

* franstory24@gmail.com

¹ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung.

² Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Jurusan Informatika dan bisnis, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

ABSTRACT

This study examines the integration of Pancasila values and Islamic teachings in civic education from the perspective of the Qur'an and Hadith, and its implications for educational participation and gender equality in Bangka Regency. The study is motivated by the need to strengthen civic education through a value-based approach that aligns national ideology with religious principles. This research employs a qualitative approach using library research methods, drawing on scholarly journal articles and normative sources, including the Qur'an and Hadith. Data were analyzed using content analysis to identify conceptual relationships and thematic patterns. The findings indicate that Pancasila values, such as divinity, humanity, and social justice, are substantively aligned with Islamic teachings, particularly in promoting equality, justice, and moral responsibility. The Qur'anic perspective emphasizes the equality of all human beings regardless of gender, supporting equal access to education as a fundamental right. The integration of these values in civic education contributes to strengthening moral awareness and encouraging active participation in education. However, the study also identifies challenges in implementation, including socio-cultural barriers and limited contextual understanding of religious teachings, which may hinder gender equality in educational access and participation. The study concludes that a more systematic and contextualized approach is needed to effectively integrate these values in civic education. Further empirical research is recommended to explore practical implementation and its impact at the local level.

Keyword: Civic Education; Pancasila Values; Islamic Education; Gender Equality; Educational Participation

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai ideologis bangsa. Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut berakar pada Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup. Pada saat yang sama, realitas sosial masyarakat Indonesia yang religius menjadikan ajaran Islam sebagai sumber nilai yang turut mempengaruhi praktik pendidikan. Integrasi antara nilai Pancasila dan ajaran Islam menjadi penting agar pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bersifat normatif formal, tetapi juga memiliki legitimasi kultural dan spiritual yang kuat. Upaya integrasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan saling menguatkan dalam membentuk karakter peserta didik (Darmanto, 2023).



Dalam praktiknya, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dan kesetaraan sebagaimana dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang menekankan perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nilai ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang berkeadilan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, integrasi nilai Islam dalam pembelajaran menjadi pendekatan yang relevan dalam memperkuat karakter peserta didik (Selviani et al., 2023).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan nilai-nilai Islam mampu memperkuat pembentukan karakter peserta didik melalui budaya sekolah yang religius. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dan etika (Azzahra & Prasetyo, 2022). Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berperan sebagai sarana internalisasi nilai Pancasila secara sistematis dalam proses pembelajaran (Azka et al., 2025). Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa implementasi nilai Pancasila dalam pembelajaran mampu membentuk karakter siswa secara lebih komprehensif (Sunaryati et al., 2024).

Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif Islam memiliki urgensi yang tinggi dalam membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak dan berkeadaban. Pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter yang berlandaskan nilai religius (Ubaidillah, 2017). Bahkan dalam konteks pendidikan dasar, pendidikan kewarganegaraan dipandang penting sebagai fondasi dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang selaras dengan ajaran Islam (Adristi et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai Islam dalam membentuk identitas peserta didik.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan isu partisipasi pendidikan dan kesetaraan gender. Dalam perspektif Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang menekankan kesetaraan manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan, baik dari aspek akses maupun partisipasi (Rohmah & Ulinuha, 2014).

Kajian lain menunjukkan bahwa konstruksi gender dalam pendidikan Islam sering kali dipengaruhi oleh interpretasi sosial dan budaya, bukan semata-mata ajaran normatif agama (Syafei et al., 2020). Hal ini berdampak pada masih adanya ketimpangan dalam akses dan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, Islam secara tegas menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan, termasuk dalam bidang pendidikan (Ardhi, 2024). Oleh karena itu, integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam pendidikan kewarganegaraan perlu diarahkan untuk mendorong kesetaraan gender sebagai bagian dari keadilan sosial.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji integrasi nilai Pancasila dan Islam dalam pendidikan kewarganegaraan, kajian yang secara spesifik mengaitkan integrasi tersebut dengan implikasinya terhadap partisipasi pendidikan dan kesetaraan gender, khususnya di tingkat lokal seperti Kabupaten Bangka, masih terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek konseptual atau implementasi di lingkungan sekolah tanpa mengaitkannya dengan isu sosial yang lebih luas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam pendidikan kewarganegaraan ditinjau dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis, serta bagaimana implikasinya terhadap partisipasi

pendidikan dan kesetaraan gender di Kabupaten Bangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hubungan antara nilai ideologis, religius, dan realitas sosial pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menghubungkan pendidikan kewarganegaraan, nilai Islam, serta isu partisipasi pendidikan dan kesetaraan gender dalam konteks lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual dan normatif terkait integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam pendidikan kewarganegaraan, serta implikasinya terhadap partisipasi pendidikan dan kesetaraan gender. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur ilmiah, khususnya artikel jurnal, serta sumber normatif berupa Al-Qur'an dan Hadis.

Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis berbagai konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan untuk menemukan keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam, serta bagaimana integrasi tersebut dipahami dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa artikel jurnal ilmiah yang secara langsung membahas integrasi nilai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, serta perspektif Islam dalam pendidikan, seperti yang dikemukakan oleh Darmanto (2023), Azzahra dan Prasetyo (2022), serta Selviani et al. (2023). Sementara itu, data sekunder meliputi literatur pendukung lain yang relevan dengan isu pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai Islam, serta kesetaraan gender dalam pendidikan, termasuk kajian Rohmah dan Ulinuha (2014) serta Ardhi (2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kredibilitas akademik dan relevansi dengan topik yang dikaji.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan cara menelaah isi literatur secara mendalam, mengidentifikasi tema-tema utama, serta menemukan pola keterkaitan antar konsep yang dibahas. Dalam proses analisis, peneliti juga menggunakan pendekatan normatif dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan dalam memahami konsep keadilan, kesetaraan, dan partisipasi dalam pendidikan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur yang memiliki tema serupa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Nilai Pancasila dan Ajaran Islam dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menunjukkan kesesuaian normatif, tetapi juga memperlihatkan adanya keselarasan filosofis antara nilai kebangsaan dan nilai keagamaan. Pancasila sebagai dasar negara mengandung prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial yang memiliki korelasi kuat dengan ajaran Islam.

Dalam perspektif Islam, prinsip ketuhanan yang menjadi sila pertama Pancasila berakar pada konsep tauhid sebagai fondasi utama kehidupan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an: (QS. Al-Ikhlâs: 1)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

Ayat tersebut menegaskan keesaan Allah sebagai dasar dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, nilai ini memperkuat dimensi spiritual dalam pembentukan karakter peserta didik, sehingga nilai kebangsaan tidak terlepas dari landasan religius.

Selanjutnya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila memiliki relevansi dengan ajaran Islam tentang penghormatan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an menyatakan: (QS. Al-Isra: 70)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia dimuliakan tanpa membedakan latar belakang, termasuk jenis kelamin, suku, dan status sosial. Pemahaman ini menjadi pijakan penting dalam pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai keadilan, toleransi, serta penghargaan terhadap sesama.

Dalam praktiknya, pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai sarana internalisasi nilai Pancasila secara sistematis dalam proses pembelajaran (Azka et al., 2025). Penguatan melalui integrasi nilai-nilai Islam memberikan dimensi tambahan, terutama dalam membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya berkembang secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat.

Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam ajaran Islam menjadi fondasi dalam membentuk perilaku warga negara yang beretika. Proses ini diperkuat melalui budaya sekolah yang menanamkan nilai religius dalam kehidupan sehari-hari peserta didik (Azzahra & Prasetyo, 2022).

Pada sisi lain, implementasi integrasi nilai tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam menerjemahkan nilai normatif ke dalam praktik pembelajaran yang kontekstual. Dalam beberapa kondisi, terlihat adanya ketidakseimbangan dalam penerapan nilai, yang mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif dalam pendidikan (Selviani et al., 2023).

Integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam pendidikan kewarganegaraan memperlihatkan bahwa nilai kebangsaan dan nilai keagamaan berada dalam relasi yang saling menguatkan. Keduanya berkontribusi dalam membentuk karakter warga negara yang tidak hanya memiliki kesadaran kebangsaan, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan spiritual (Darmanto, 2023).

2. Perspektif Al-Qur'an terhadap Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Isu kesetaraan gender dalam pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks Islam, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran memberikan landasan normatif yang kuat mengenai kesetaraan manusia, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan ini tidak dimaknai sebagai kesamaan mutlak dalam seluruh aspek, melainkan sebagai kesetaraan dalam hak, martabat, dan kesempatan, termasuk dalam memperoleh pendidikan.

Al-Qur'an secara tegas menegaskan prinsip kesetaraan manusia tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini tercermin dalam firman Allah: (QS. Al-Hujurat: 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan. Perspektif ini memberikan dasar teologis bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah, termasuk dalam hal akses

terhadap pendidikan. Pendidikan, dalam hal ini, menjadi hak universal yang tidak boleh dibatasi oleh konstruksi sosial yang diskriminatif.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi seluruh manusia tanpa pengecualian. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah:(QS. Al-'Alaq: 1)

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Perintah membaca dalam ayat tersebut tidak ditujukan secara eksklusif kepada laki-laki, melainkan kepada seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan pendidikan sebagai kewajiban yang bersifat universal. Dalam konteks ini, pembatasan akses pendidikan bagi perempuan tidak memiliki dasar normatif dalam ajaran Islam.

Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam Islam juga menjadi landasan penting dalam memahami kesetaraan gender. Al-Qur'an menyatakan: (QS. An-Nahl: 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Keadilan dalam konteks gender berarti memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkembang, tanpa adanya diskriminasi struktural maupun kultural.

Dalam kajian pendidikan Islam, kesetaraan gender sering kali mengalami distorsi akibat interpretasi yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Beberapa praktik pendidikan masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kesetaraan gender lebih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial dibandingkan oleh ajaran Islam itu sendiri (Rohmah & Ulinuha, 2014).

Pandangan serupa juga menunjukkan bahwa konsep gender dalam pendidikan Islam perlu dipahami secara proporsional, dengan membedakan antara ajaran normatif dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat (Syafei et al., 2020). Ketidaktepatan dalam memahami konsep ini dapat berimplikasi pada munculnya ketidakadilan dalam sistem pendidikan, khususnya dalam hal akses dan partisipasi perempuan.

Dalam konteks yang lebih kontemporer, pemikiran tentang kesetaraan gender dalam Islam juga berkembang melalui pendekatan tafsir yang lebih kontekstual. Kesetaraan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan hak, tetapi juga sebagai upaya untuk menghilangkan hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan dalam pendidikan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan gender merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sosial (Ardhi, 2024).

Di sisi lain, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mendorong kesadaran tentang kesetaraan gender. Melalui integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi ruang untuk membangun pemahaman yang inklusif dan berkeadilan. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi (Al Hadi & Nazila, 2025).

Meski memiliki landasan normatif yang kuat, implementasi kesetaraan gender dalam pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di tingkat lokal. Faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman keagamaan yang belum komprehensif sering kali menjadi penghambat dalam mewujudkan kesetaraan tersebut. Dalam beberapa kasus, perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan yang setara dengan laki-laki (Mardiyah, 2015).

Dalam konteks Kabupaten Bangka, isu ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut,

mengingat adanya dinamika sosial yang mempengaruhi partisipasi pendidikan. Integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam diharapkan dapat menjadi solusi normatif sekaligus praktis dalam mendorong kesetaraan gender dalam pendidikan.

3. Implikasi Integrasi Nilai Pancasila dan Ajaran Islam terhadap Partisipasi Pendidikan di Kabupaten Bangka

Partisipasi pendidikan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan, terutama dalam mencerminkan sejauh mana masyarakat memiliki akses, keterlibatan, dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Dalam konteks Kabupaten Bangka, partisipasi pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ketersediaan fasilitas dan kebijakan, tetapi juga oleh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai Pancasila dan ajaran Islam.

Integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki implikasi signifikan terhadap peningkatan partisipasi pendidikan. Nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam Pancasila, yang selaras dengan ajaran Islam, mendorong kesadaran bahwa pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam Islam, pentingnya ilmu pengetahuan ditegaskan dalam Al-Qur'an: (QS. Az-Zumar: 9)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَحْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَحْمَلُونَ

Ayat ini memberikan dorongan normatif bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, sehingga pendidikan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Kesadaran ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengakses dan berpartisipasi dalam pendidikan.

Selain itu, integrasi nilai dalam pendidikan kewarganegaraan juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Pendidikan tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai media internalisasi nilai yang memperkuat kesadaran tersebut (Azka et al., 2025).

Di tingkat praktis, budaya sekolah yang mengintegrasikan nilai religius dan kebangsaan turut mempengaruhi tingkat partisipasi peserta didik. Lingkungan pendidikan yang menanamkan nilai moral dan spiritual cenderung lebih mampu membangun motivasi belajar yang tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa integrasi nilai dalam budaya sekolah dapat memperkuat karakter peserta didik sekaligus meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran (Azzahra & Prasetyo, 2022).

Namun, peningkatan partisipasi pendidikan tidak terlepas dari tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi masih menjadi penghambat utama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan secara optimal. Di sisi lain, pemahaman yang kurang komprehensif terhadap ajaran agama juga dapat mempengaruhi rendahnya partisipasi, terutama jika pendidikan tidak dipandang sebagai prioritas.

Dalam perspektif Islam, pendidikan merupakan kewajiban yang memiliki dimensi ibadah, sehingga keterlibatan dalam pendidikan seharusnya menjadi bagian dari kesadaran religius. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi nilai Islam dalam pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, terutama jika nilai tersebut disampaikan secara kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat (Adristi et al., 2023).

Lebih jauh, partisipasi pendidikan juga berkaitan erat dengan isu kesetaraan gender. Ketika nilai keadilan dalam Pancasila dan ajaran Islam diinternalisasikan dengan baik, maka peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses pendidikan akan semakin terbuka.

Prinsip keadilan ini menjadi dasar dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif.

Pada sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam partisipasi pendidikan, khususnya bagi kelompok tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa integrasi nilai belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam sistem pendidikan. Karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mengembangkan model pendidikan kewarganegaraan yang mampu menghubungkan nilai normatif dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Bangka, integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan partisipasi pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek kognitif, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Upaya ini berperan dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih berpendidikan, berkeadaban, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang bersifat substantif dan saling menguatkan. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga integrasi keduanya tidak berada dalam posisi yang bertentangan, melainkan membentuk fondasi normatif yang kuat dalam pendidikan.

Dalam perspektif Al-Qur'an, kesetaraan manusia, termasuk dalam konteks gender, ditegaskan sebagai bagian dari prinsip keadilan dan kemuliaan manusia. Hal ini memberikan landasan teologis bahwa akses dan partisipasi dalam pendidikan seharusnya terbuka bagi semua individu tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan adanya kesenjangan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan yang belum sepenuhnya komprehensif.

Integrasi nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam pendidikan kewarganegaraan juga memiliki implikasi terhadap partisipasi pendidikan, khususnya di Kabupaten Bangka. Pendekatan ini mampu mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tidak hanya sebagai kebutuhan formal, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Meski memiliki potensi yang besar, implementasi integrasi nilai tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan penguatan dalam praktik pendidikan yang lebih kontekstual dan inklusif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang tidak secara langsung menggali data empiris di lapangan. Akibatnya, analisis yang dihasilkan lebih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi faktual secara spesifik di Kabupaten Bangka. Selain itu, penelitian ini terbatas pada penggunaan sumber literatur tertentu sehingga masih terbuka kemungkinan adanya perspektif lain yang belum terakomodasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adristi, A. S., Damanik, W. A., Nadira, D. A., Alia, R., Siregar, A., & Yusnaldi, E. (2023). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk SD/MI dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1).
- Al Hadi, M. S., & Nazila, I. P. (2025). Gender dalam perspektif Islam dan ilmu pendidikan. *ALSYS Journal*.
- Ardhi, S. W. (2024). Keadilan gender dalam Al-Qur'an dan implementasinya di Indonesia. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 6(2).

- Azzahra, T., & Prasetyo, W. H. (2022). Integrasi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan budaya sekolah Islam bagi karakter peserta didik. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(2).
- Azka, M., Ziyah, N. N., Maulana, R., & Arleawati, A. (2025). Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana internalisasi nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2(3), 125–137. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i3.704>
- Darmanto, D. (2023). Integrasi nilai-nilai ajaran Islam dalam Pancasila. *J-MPI: Jurnal Manajemen Pendidikan, Penelitian dan Kajian Keislaman*, 2(1).
- Hakim, L. (2023). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban Journal*.
- Jayadiputra, E., Karim, A. A., Sapriya, S., & Rahmat, R. (2023). The Pancasila and civic education curriculum model at 21st century. *Jurnal Civics*, 20(1). <https://doi.org/10.21831/jc.v20i1.49455>
- Mardiyah. (2015). Isu gender dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(2).
- Rohmah, N., & Ulinuha, L. (2014). Relasi gender dan pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 345–364.
- Sadia, H., Madani, M., & Muhajir. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan karakter siswa pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di madrasah ibtidaiyah. *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*, 7(1). <https://doi.org/10.35568/naturalistic.v7i1.1878>
- Selviani, R., Zaman, N., & Ikbah, M. (2023). Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3). <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.32928>
- Sunaryati, T., Firdaus, A., Maluf, M. S., & Rayyan, M. F. (2024). Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran kewarganegaraan di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kolaboratif Nusantara*, 6(1).
- Syafei, I., et al. (2020). Konsep gender dalam perspektif pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2).
- Ubaidillah. (2017). Urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terhadap pembentukan karakter peserta didik. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(1).